

**ANALISIS YURIDIS PERAMBAHAN HUTAN PADA HUTAN KONSERVASI
TANPA IZIN MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
(Studi Di Polres Padang Lawas)**

ABSTRAK

Budi Candra Nasution *

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatkan kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri, bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan merambah kawasan hutan. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan "mengerjakan kawasan hutan" adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan hutan pada hutan konservasi tanpa izin Menteri dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf UU No. 41/1999 setiap orang dilarang merambah kawasan hutan". Terhadap perbuatan kemudian "dihukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling denda Rp 5 milyar Penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana perambahan hutan di kawasan hutan konservasi di Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui tindakan represif atau penggunaan sarana Pidana (*criminal law application*), Upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kata Kunci : Perambahan, Hutan Konservasi, Tanpa Izin

**URIDICAL ANALYSIS OF FOREST ENGROSSING IN CONSERVATION
FOREST WITHOUT MINISTER PERMISSION BASED ON LAW
NUMBER 41 OF 1999 CONCERNING FORESTRY
(Study at Padang Lawas Police)
ABSTRACT**

Budi Candra Nasution *

The increase in population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land area does not increase. The easiest targets to access are forest areas. This is what opens up opportunities for forest encroachment. As for the formulation of the problem in this thesis research, namely how to regulate the law on criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how to enforce the law against criminal acts of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission, how are the countermeasures carried out by the government against criminal acts of forest encroachment in conservation forest area in Padang Lawas Regency.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials and field research. Primary and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials

The result of the research is the legal arrangements for the criminal act of forest encroachment on conservation forests without the Minister's permission are regulated in Article 50 paragraph (3) letters a and b of Law no. 41 of 1999 states that everyone is prohibited from illegally working and or using and/or occupying forest areas and encroaching on forest areas. In the elucidation of the article it is said that, what is meant by "working on a forest area" is cultivating land in a forest area without obtaining permission from the competent authority, including for cultivation, for agriculture, or for other businesses. That law enforcement against the criminal act of forest encroachment on conservation forest without the Minister's permission is subject to Article 50 paragraph (3) letter of Law no. 41/1999 everyone is prohibited from encroaching on forest areas". Against the subsequent actions "punished by imprisonment for a maximum of 10 years and a maximum fine of Rp. 5 billion. The government's countermeasures against criminal acts of encroachment on forests in conservation forest areas in Padang Lawas Regency are carried out through repressive measures or the use of criminal means (criminal law application), Efforts Law enforcement with preventive measures or without punishment is more of a preventive measure against the occurrence of crime, so the main goal is to deal with the conducive factors that cause crime.

Keywords: Encroachment, Conservation Forest, Without Permit